

POLA REKRUTMEN POLITIK PENGURUS
DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL (DPD PAN)
KOTA PEKANBARU PERIODE 2010-2015

Oleh : Azlansyah (0801120206)
Pembimbing : Ishak

ABSTRACT

This study aimed to describe the pattern used one of Indonesia's major political parties in recruiting candidates for the party to then become administrators. Political Parties in Shafiyurahman is a group of people gathered by a common interest, or the overall benefit that is based on beliefs and ties on the basis of faith or disbelief and wickedness and disobedience, or on the basis of ties of birth or a particular tribe or clan and lineage as a profession and linguistic ties or Any form of various bonds and properties that require human welfare gather it and support it (Shafiyurrahman, 2008: 5). One function of a political party is a political recruitment. Rekrutmen as an process which consist of and screening channeling of politics which is flange at egabilitas (accomplishment of condition) nomination like education and experience.

Each political party has a different pattern of recruiting managers. National Mandate Party (PAN) is a party that uses inclusive recruitment pattern (open) and partisan. It is based on a form, process, method and placement of its members then the members of the National Mandate Party including using inclusive recruitment patterns (open).

Writer collect data with quantitative method but analysing it with qualitative method, writer elaborate this writing by is descriptive of analysis that is try to analyse a problems of arising out in field and analyse result of research at the same time depict the the problems carefully and clearly. Result of research show from three indicator seen only one indicator was good criterion, so that concluded that Rekrutmen Pattern Official Member of National Mandate Party Pekanbaru City Period 2010-2015 is bad, because two indicators is not reached maximally.

After the analysis hence last conclusion in research concerning Pattern Rekrutmen of Official Member Of Board Of Directors Area National Mandate Party Pekanbaru City Period 2010-2015 have refer to AD/RT just only do not too is looked by Recruiter or Team Formator in recruit its official member member candidate or can be told only as just formality, the official member candidate although cause do not fulfill conditions according to AD/RT but remain to be accepted as official member.

Key words : Party, Pattern, Recruitment.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PAN (Partai Amanat Nasional) merupakan partai politik yang secara kelahirannya adalah berasal dari organisasi massa islam yaitu Muhammadiyah. Yang menjadi aktor pendirinya adalah Amien Rais yang pada saat itu menjabat sebagai ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah. Sebelumnya ia ditawari untuk memimpin PBB (Partai Bulan Bintang) yang berasaskan islam tapi ia menolak karena ia ingin mendirikan partai berasaskan pancasila, pluralis, menghimpun kekuatan lintas agama dan ideologi.

Partai PAN adalah “anak tunggal” Muhammadiyah yang mencoba secara modern mereformasi Indonesia sesuai dengan sikap dan tradisi keterbukaan yang dulu pernah disemai

oleh Amin Rais ketika menjabat sebagai ketua organisasi kaum modernis Muslim terbesar di Indonesia ini. (Al Chaidar, 1999: 122).

PAN merupakan partai islam yang dilihat dari kelahirannya, sedangkan azas dari partai ini adalah pancasila dan bersifat terbuka jika dilihat dari AD PAN yaitu pada pasal 4 dan 5. PAN yang terbentuk sejak tahun 1998 pada masa orde baru hingga saat ini masih eksis seperti pada pemilu legislatif indonesia tahun 2009-2014 dengan perolehan kurang lebih enam juta suara yang menempati peringkat 5 besar.

Mengingat pentingnya kedudukan partai PAN ini dalam konteks pembangunan politik indonesia, khususnya di Kota Pekanbaru maka PAN harus menampilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas untuk mengelola kelangsungan hidup partai. Dengan demikian keberhasilan PAN menjalankan fungsinya sebagai *agen of change* dan pembawa aspirasi rakyat sangat tergantung dari siapa yang akan duduk sebagai pembawa aspirasi tersebut.

Yang perlu mendapat perhatian adalah masalah perekrutan kepengurusan partai. Untuk menciptakan kepengurusan yang baik, maka perlu diadakan pengkaderan untuk menjaga kelangsungan kehidupan dalam rangka keutuhan partai.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kota Pekanbaru merupakan salah satu bagian dari rangkaian suatu sistem yang bernaung dibawah sistem politik Nasional. Di Kota Pekanbaru Riau, turut bertanggung jawab atas pembangunan demokrasi pancasila di daerah ini. Dalam rangka itu pengurus DPD PAN Kota Pekanbaru haruslah diisi oleh orang-orang yang terampil dan mengerti dengan visi, misi serta perjuangan dari partainya. Lebih jauh lagi bahwa DPD PAN Kota Pekanbaru juga harus tanggap dengan kondisi yang berkembang ditengah-tengah masyarakat. Hal ini penting untuk mempertahankan dan menjaga perolehan suara dalam pemilihan umum.

Sedangkan untuk menjawab semua tantangan tersebut adalah orang-orang yang betul mempunyai kemampuan yang tinggi dan pengetahuan yang luas, Sebagaimana yang diamanahkan dalam ART PAN pasal 41 ayat 3 dan 6 yang berbunyi :

- (3) Setiap pengurus partai harus telah mengikuti perkaderan partai yang dibuktikan dengan sertifikat perkaderan dan atau surat keterangan dari pimpinan partai bahwa yang bersangkutan pernah mengikuti perkaderan dan atau surat pernyataan bahwa yang bersangkutan akan mengikuti perkaderan partai;
- (6) Untuk menjadi pengurus harian dewan pimpinan partai disetiap tingkatan harus pernah membaktikan diri sebagai pengurus partai 1 (satu) tingkat dibawahnya minimal dalam 1 (periode) kepengurusan atau sedang/pernah menjadi anggota legislatif/eksekutif mewakili PAN.

Berdasarkan hal diatas ternyata PAN memiliki persyaratan-persyaratan dalam pelaksanaan rekrutmen pengurus partai dalam hal ini terkait dalam kepengurusan DPD PAN seperti yang tertuang dalam ART PAN pasal 41 ayat 3 dan 6. Akan tetapi aturan ini belum sepenuhnya menjadi acuan para kader dalam merekrut pangurus, seperti DPD PAN Kota Pekanbaru dalam merekrut pengurus untuk periode 2010-2015.

Oleh sebab itu, saya sebagai peneliti tertarik untuk melihat pola rekrutmen politik pengurus dewan pimpinan cabang partai amanat nasional, karena rekrutmen politik harus didasarkan pada kriteria-kriteria dan syarat-syarat tertentu yang mana setiap partai memiliki persyaratan yang berbeda dalam hal pengangkatan dan penunjukan untuk menjadi pimpinan atau menduduki jabatan politik maupun jabatan partai harus terlebih dahulu melalui jenjang pengkaderan yang telah disiapkan oleh suatu partai dan telah melewati berbagai ujian yang diberikan oleh partai tersebut, seperti keahlian atau keterampilan, tingkat pendidikan, pengalaman organisasi dan sebagainya, maka begitu pula halnya dengan Dewan Pimpinan

Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kota Pekanbaru yang menjadi objek penelitian ini di dalam melakukan rekrutmen pengurus partainya mestilah mengacu kepada peraturan yang telah ditetapkan yaitu pada ART PAN tetapi mengapa DPD PAN dalam merekrut pengurus tidak terlalu memperhatikan aturan yang ada pada ART tersebut dan bagaimana sebenarnya pola rekrutmen DPD PAN dalam merekrut pengurusnya. Sebab apabila PAN merekrut orang atau kader berbakat dan teruji dengan penyaringan dan penyeleksian melalui proses rekrutmen yang ketat maka akan menjamin kelangsungan hidup partai dan memajukan partai tersebut serta mempunyai peluang untuk menang dalam pemilu.

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terkait Pola Rekrutmen Partai Amanat Nasional Kota Pekanbaru. Maka, penulis mengambil judul untuk usulan Penelitian Skripsi ini adalah tentang: “POLA REKRUTMEN POLITIK PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL (DPD PAN) KOTA PEKANBARU PERIODE 2010-2015”.

1.2 Perumusan Masalah

Bagaimanakah Pola Rekrutmen Politik Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kota Pekanbaru Periode 2010-2015?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Pola Rekrutmen Politik Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kota Pekanbaru Periode 2010-2015.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Sebagai bahan masukan bagi pengurus partai politik terutama bagi partai PAN dan penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi akademisi yaitu penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah Ilmu Pengetahuan Khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan dan dapat digunakan sebagai bahan informasi, sumber bacaan dan acuan dalam melakukan penelitian lebih lanjut, terutama dalam meneliti yang berkaitan dengan kajian yang sama.

1.4 Konsep Teori

Sebelum membahas teori rekrutmen, terlebih dahulu akan dipaparkan mengenai teori partai politik yang mempraktekkan rekrutmen politik. Partai Politik adalah sekelompok manusia yang dikumpulkan oleh kepentingan bersama, atau kemaslahatan menyeluruh yang didasari oleh ikatan keyakinan maupun keimanan atau atas dasar kekufuran dan kefasikan serta kemaksiatan, atau atas dasar ikatan kelahiran atau kabilah suku dan nasab tertentu atau karena ikatan profesi dan bahasa atau apa saja bentuknya dari berbagai ikatan maupun sifat kemaslahatan yang mengharuskan manusia berkumpul atasnya dan mendukungnya (Shafiyurrahman, 2008: 5).

Menurut Miriam Budiardjo, Partai Politik secara umum dikatakan sebagai suatu kelompok yang teorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik -(biasanya) dengan cara konstitusional- untuk melaksanakan programnya.

Menurut Carl J. Friedrich, Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil dan materiil.

Sigmund Neuman dalam karangannya *Modern Political Parties* mengemukakan definisi partai politik sebagai organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda (Miriam Budiardjo, 2008: 404).

Partai politik tidaklah tumbuh secara otomatis, melainkan melalui tahapan-tahapan perkembangan yang menentukan. Berkaitan dengan hal itu, Samuel P. Huntington mengklasifikasikan pertumbuhan dan perkembangan partai kedalam empat tahap, yaitu tahap faksionalisasi, polarisasi, perluasan dan pelembagaan (Bambang Cipto, 1996:4).

Dalam tahap pertama, *faksionalisasi*, masyarakat baru mengenal partai sebagai suatu invensi kultural baru ditengah rendahnya tingkat partisipasi dan pelembagaan politik. Politik ditandai dengan persaingan sengit antara kelompok atau faksi yang memperebutkan kekuasaan atau pengaruh. Masyarakat kurang mengenal tuntutan organisasi politik modern yang melibatkan isu stabilitas dan penataan kehidupan politik. Masyarakat masih sangat asing dengan dua ciri organisasi politik modern, sebagai organisasi profesional dan sebagai basis sosial pendukung organisasi politik tersebut.

Tahap kedua perkembangan sistem kepartaian adalah *polarisasi*. Tahap ini merupakan proses “tinggal landas” dalam masyarakat yang berusaha keluar dari partai politik tradisional yang melindungi faksi yang saling bersaing secara personal. Masyarakat yang terpola secara dinamis memperlebar basis sosial masing-masing kelompok sebagai akibat dari kebutuhan untuk memelihara dan memperkuat posisi masing-masing.

Pada tingkat ini sistem partai memasuki tahap perluasan (*ekspansi*). Partai berkembang menjadi organisasi politik yang semakin membutuhkan dukungan massa. Dengan kata lain, pada tahap ketiga ini, partisipasi politik masyarakat meluap dan memerlukan kontribusi partai sebagai agregator kepentingan umum. *Pelembagaan* adalah tahap akhir dari pertumbuhan partai politik. Pada titik ini, sistem partai relatif telah mencapai tahap mapan yang ditandai antara lain dengan terbentuknya sistem dua partai, sistem multipartai, atau sistem paratai tunggal dominan. Sistem partai yang telah terlembaga relatif tidak banyak mengalami perubahan kuantitas. Dengan tahap pelembagaan yang kuat ini, partai politik telah memiliki fungsi yang lebih dan tegas dalam tatanan sistem ketatanegaraan suatu negara (Bambang cipto, 1996:5).

Menurut Maurice Duverger dalam tulisan pendeknya yang terkenal berjudul *Caucus and Branch, Cadre Parties and Mass Parties*, mengajukan dua tipe partai politik, baik berdasarkan struktur maupun berdasarkan tujuan dan ideologi politik. Yaitu tipe kaukus atau partai kader dan tipe partai massa. Partai massa menurut Duverger mempunyai ciri-ciri, *pertama*, rekrutmen anggota tampak sebagai kegiatan yang fundamental. Dari sudut politik kuantitas anggota merupakan hal yang penting dalam proses pendidikan rakyat. Semakin banyak jumlah anggota partai, semakin banyak orang yang bisa dipengaruhi melalui pendidikan politik tersebut.

Kedua, dukungan keuangan bagi partai diperoleh dari massa anggota bukan dari kalangan elite. Partai massa mengambil alih peran pendanaan oleh kaum kapitalis dalam kegiatan pemilihan, sehingga tercipta pola pendanaan dan keuangan partai yang demokratis. (Maitar Hardiansyah: 2008)

Secara teoritis apa yang dikemukakan Duverger pada ciri yang kedua ini tidak bisa diterapkan dalam melihat konteks Partai Amanat Nasional (PAN) karena ciri yang dipaparkan tidak sesuai dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Dalam Partai Amanat Nasional (PAN) masalah pendanaan justru sebaliknya, sebagaimana partai massa lainnya di Indonesia didanai oleh kalangan elit partai yang ada di pimpinan pusat partai.

Menurut Miriam Budiardjo, dalam negara demokratis Partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi, antara lain (1) sebagai sarana komunikasi politik (*instrument of political communication*), (2) sebagai sarana sosialisasi politik (*instrument of political socialization*), (3) sebagai sarana rekrutmen politik (*instrument of political recruitmen*), (4) sebagai sarana pengatur konflik (*instrument of conflict management*). Namun selain fungsi-fungsi diatas, partai politik juga berfungsi sebagai tempat memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi dari yang memerintah kepada yang diperintah, antara pemerintah dengan warga masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini partai politik disebut sebagai perantara ide-ide (*clearing house of ideas*). (Miriam Budiardjo, 2008: 405).

Dari keempat fungsi partai politik di atas, fungsi Rekrutmen Politik berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.

Selain untuk tingkatan seperti itu partai politik juga berkepentingan memperluas atau memperbanyak keanggotaan. Maka ia pun berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggotanya. Dengan didirikannya organisasi-organisasi massa (sebagai *onderbouw*) yang melibatkan golongan-golongan buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita dan sebagainya, kesempatan untuk berpartisipasi diperluas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Ada berbagai cara untuk melakukan rekrutmen politik, yaitu melalui kontak pribadi, persuasi, ataupun cara-cara lain (Miriam Budiardjo, 2008: 408).

Fungsi rekrutmen selain memiliki hubungan dengan cara partai politik menjaring seseorang atau sekelompok orang sebagai kader partai, fungsi rekrutmen politik dianggap juga berhubungan dengan bagaimana seseorang, baik dari *in-group* maupun dari *out-group* menjadi pimpinan partai atau pimpinan nasional (presiden atau wakil presiden). Dengan fungsi ini, menurut Miriam Budiardjo, partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota atau kader partai. Dengan demikian partai politik turut memperluas partisipasi politik yang dilakukan dengan cara kontak pribadi, persuasi dan lain-lain. Selain itu, juga diusahakan menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang dimasa mendatang akan menggantikan pimpinan lama (*selection of leadership*).

Senada dengan hal itu Ramlan Surbakti, berpendapat bahwa rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Fungsi ini semakin besar porsinya manakala partai politik itu merupakan partai

tunggal seperti dalam sistem politik totaliter atau manakala partai ini merupakan partai mayoritas dalam badan perwakilan rakyat yang berwenang membentuk pemerintahan dalam sistem politik demokrasi. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik, sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan perannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam (Ramlan Surbakti, 1992:118).

Pola rekrutmen politik adalah bentuk, cara dan proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik, termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik. Ada dua macam mekanisme rekrutmen politik, yaitu rekrutmen yang terbuka dan tertutup. Dalam model rekrutmen terbuka, semua warga negara yang memenuhi syarat tertentu (seperti kemampuan, kecakapan, umur, keadaan fisik, dsb) mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki posisi-posisi yang ada dalam lembaga lembaga politik termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik. Suasana kompetisi untuk mengisi jabatan biasanya cukup tinggi, sehingga orang-orang yang benar-benar sudah teruji saja yang akan berhasil keluar sebagai pemenangnya. Ujian tersebut biasanya menyangkut visinya tentang keadaan masyarakat atau yang di kenal sebagai platform politiknya serta nilai moral yang melekat dalam dirinya termasuk integritasnya. Sebaliknya, dalam sistem rekrutmen tertutup, kesempatan tersebut hanyalah dinikmati oleh sekelompok kecil orang. Ujian oleh masyarakat terhadap kualitas serta integritas tokoh masyarakat biasanya sangat jarang dilakukan, kecuali oleh sekelompok kecil elit itu sendiri (Suharno, 2004: 117).

Haryanto sendiri mengatakan bahwa rekrutmen politik pada hakekatnya dapat diartikan sebagai penyeleksian individu yang berbakat untuk dapat menduduki jabatan-jabatan politik maupun jabatan pemerintahan (Haryanto, 1982: 46). Dalam studi rekrutmen politik, model seligmen merupakan model yang paling sederhana, model seligmen ini memandang rekrutmen sebagai suatu proses yang terdiri dari:

1. Penyaringan dan Penyaluran politik yang mengarah pada egabilitas (pemenuhan syarat) pencalonan seperti pendidikan dan pengalaman,
2. Pencalonan atau proses dua tahap yang mensyaratkan inisiatif dan penguatan, dan
3. Seleksi, yakni pencalonan elit politik yang sebenarnya.

Haryanto juga mengatakan bahwa pelaksanaan rekrutmen politik pada umumnya dilaksanakan dengan dua cara, yaitu:

a. Secara tertutup

Rekrutmen hanya bisa dilakukan pada individu-individu tertentu saja yang dapat menduduki jabata politik.

b. Secara terbuka

Rekrutmen terbuka bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. (Haryanto, 1982: 47).

Rekrutmen yang dilakukan untuk menjadi anggota partai ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi diantaranya adalah:

1. Pengalaman Organisasi

Pengalaman ini baik selama ia menjadi anggota partai maupun sebelum menjadi anggota partai, karena ini merupakan hal yang mutlak diperlukan oleh seorang calon anggota parlemen dalam menjalankan roda organisasi nantinya.

2. Tingkat Pendidikan

Ditingkat pendidikan baik formal maupun informal, tingkat pendidikan berkaitan erat dengan wawasan seseorang dalam menghadapi sesuatu masalah dan perilaku organisasi. Akan tetapi dalam AD/RT partai manapun tidak dicantumkan kriteria tingkat pendidikan sebagai persyaratan.

3. Pelatihan Kader atau Keterampilan Organisasi

Dimana hal ini merupakan Pelatihan untuk memberikan keterampilan dan kemampuan seorang calon anggota didalam mengelola organisasi nantinya.

Dapatlah dikatakan bahwa disetiap sistem politik terdapat prosedur-prosedur untuk melaksanakan rekrutmen atau penseleksian, akan tetapi walaupun prosedur-prosedur yang dilaksanakan oleh tiap-tiap sistem politik berbeda-beda satu dengan yang lainnya, namun terdapat suatu kecendrungan bahwa individu-individu yang berbakat yang dicalonkan untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan mempunyai latar belakang yang hampir sama, yaitu bahwa mereka berasal dari kelas menengah atau kelas atas dan walaupun mereka berasal dari kelas bawah tetapi mereka merupakan orang-orang yang telah memperoleh pendidikan yang memadai (Haryanto, 1982:47).

Sedangkan menurut *Leijenaar* dan *Niemaler* ada beberapa faktor-faktor yang dipertimbangkan partai politik dalam menentukan calon legislative di Belanda yaitu:

- a. Karakteristik kemampuan yang meliputi: Pembicara yang baik, mempunyai keahlian khusus, memiliki semangat dan antusias tinggi serta mempunyai pengetahuan yang dalam terhadap isu-isu politik.
- b. Karakteristik yang melekat meliputi: jenis kelamin, usia, etnis dan penampilan.
- c. Tingkat orientasi local meliputi: komitmen pada daerah pilihan, popularitas ditingkat local, dukungan massa partai politik dan organisasi kemasyarakatan.
- d. Agama, norma dan nilai meliputi: ketaatan beragama dan kestabilan dalam kehidupan rumah tangga.
- e. Pengalaman politik meliputi: pengalaman politik dan pengalaman sebagai pekerja partai. (Pippa Norris, 1997)

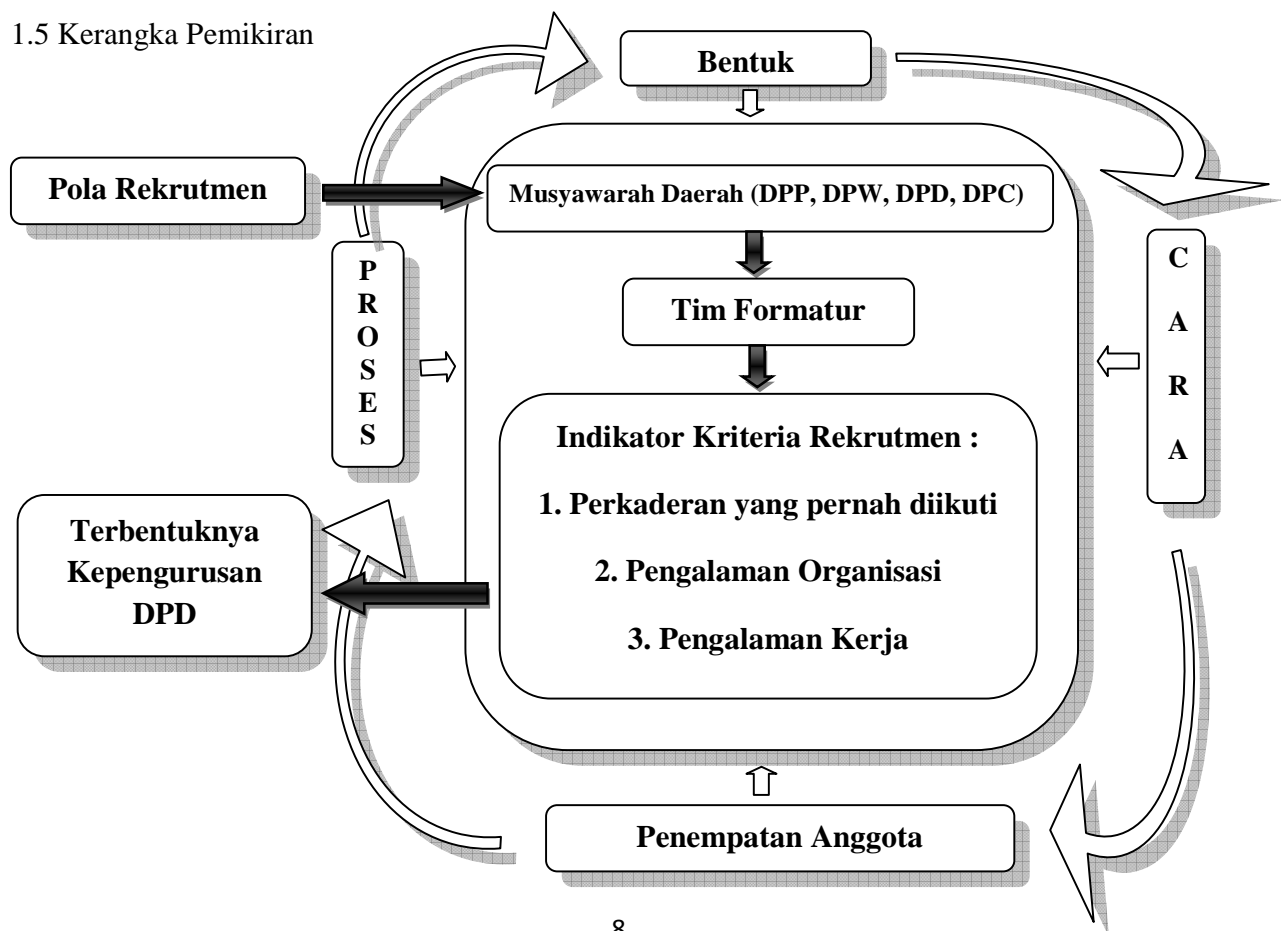
Rekrutmen politik didalam pelaksanaannya memiliki keragaman yang tiada terbatas, walaupun memiliki dua cara khusus yaitu seleksi pemilihan melalui ujian serta latihan dapat

dikatakan sebagai proses rekrutmen yang paling penting. Michael Rush dan Philip Althof (2000:187) berkata bahwa metode rekrutmen politik yang digunakan oleh oleh suatu sistem politik adalah :

1. Metode giliran atau rotasi, dalam metode ini rekrutmen dilaksanakan untuk mencegah dominasi jabatan dari posisi-posisi berkuasa orang atau individu-individu tertentu.
2. Perebutan kekuasaan, akibat yang paling langsung dan nyata dari metode ini adalah penggantian pemegang jabatan politik, akan tetapi perubahan-perubahan dalam personil birokrasi biasanya menimbulkan hasil yang lebih lambat.
3. Patronage Pelaksanaan rekrutmen yang biasanya menggunakan cara penyuaipan dan sistem korupsi yang rumit. Oleh karena itu sebagai sistem perekrutan sistem ini tidak selalu dapat menjamin perekrutan pemegang-pemegang jabatan yang cocok baik secara politik maupun diukur dari kemampuannya.

Gabriel Almond ikut berbicara bahwa : “Rekrutmen politik adalah merupakan fungsi penyeleksi rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintah melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan tujuan.” (Mas’oed, 1986:29).

1.5 Kerangka Pemikiran



1.6 Konsep Operasional

Konsep menurut Singarimbun dan Effendi (1989: 34) adalah “Abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu”.

Konsep mempunyai tingkat regeneralisasi yang berbeda-beda. Semakin dekat suatu konsep kepada realita maka semakin dekat konsep itu diukur (Singarimbun dan Effendi, 1989: 17). Lebih lanjut Marton (dalam Koentjoroningrat, 1997: 21) mengungkapkan bahwa, “Konsep merupakan definisi dan apa yang perlu diamati; konsep menentukan antara variabel empiris”.

Untuk membatasi pengertian dan tidak mengaburkan penelitian agar memudahkan penganalisaan sesuai dengan masalah-masalah yang diamati maka peneliti menguraikan konsep-konsep dalam penelitian ini sebagai berikut :

1.6.1 Partai Politik

Partai Politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kelompok anggota yang terorganisir secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu dan mencari serta mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum.

1.6.2 Fungsi Partai Politik

Fungsi Partai Politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanggung jawab partai politik baik terhadap masyarakat maupun terhadap bangsa dan negara. tanggung jawab tersebut meliputi penyelenggaraan pendidikan politik mengakomodasi aspirasi kedalam pembuatan kebijaksanaan dan mempersiapkan anggota masyarakat unruk mengisi jabatan-jabatan politik.

1.6.3 Rekrutmen Politik

Rekrutmen Politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyeleksian anggota masyarakat dalam kegiatan politik untuk dapat menduduki jabatan politik yang lebih luas.

1.6.4 Pola Rekrutmen Politik

Pola Rekrutmen Politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bentuk, cara serta proses penyeleksian dan penempatan anggota masyarakat untuk menjadi pengurus sekaligus kader partai.

1.6.5 Tim Formatur

Sekolompok anggota yang telah dibentuk dalam Musyawarah Daerah yang mempunyai tugas dalam perekrutan anggota pengurus.

1.6.6 Pengurus

Orang-orang yang telah lulus dalam penyeleksian calon anggota pengurus.

1.6.7 Dewan Pimpinan Daerah (DPD)

Dewan Pimpinan Daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesatuan organisasi dan kepemimpinan partai ditingkat Kabupaten/Kota.

1.6.8 Partai Amanat Nasional

Partai Amanat Nasional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu partai politik yang berasal dari ormas Muhammadiyah yang berasaskan pancasila yang dibentuk dan dideklarasikan pada hari Ahad/Minggu tanggal 23 Agustus 1998 di Jakarta seperti yang tertuang dalam AD PAN Pasal 1 ayat 1.

1.6.9 Periode

Yaitu Masa Jabatan Pengurus yang telah direkrut 2010-2015.

1.6.10 Ormas

Ormas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah organisasi massa yang terbentuk berdasarkan spesifikasi tertentu seperti kepentingan yang sama, agama atau aliran tertentu yang tidak ikut menyertakan diri untuk dipilih dalam pemilihan umum legislatif.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya.

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Singarimbun dan Effendi, 1989: 3), dan metode kualitatif adalah metode yang tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan hasilnya (Arikunto, 2006: 12). Penulis mengumpulkan data dengan metode kuantitatif tapi menganalisisnya dengan metode kualitatif, penulis menguraikan penulisan ini dengan cara deskriptif analisa yaitu mencoba menganalisa suatu permasalahan yang timbul di lapangan dan menganalisa hasil penelitian sekaligus menggambarkan permasalahan tersebut secara cermat dan sejelas-jelasnya.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Peneliti menetapkan pada kantor sekretariat DPD PAN Kota Pekanbaru. Berdasarkan pertimbangan bahwa objek yang diteliti merupakan pengurus yang berada pada sekretariat DPD PAN atau disebut Rumah PAN di Kota Pekanbaru. Untuk mempermudah pengamatan dan penelitian dilapangan terhadap pola rekrutmen politik pada pengurus DPD PAN dengan memperhatikan kriteria-kriteria yang ada dalam penagangkatan pengurus.

1.7.3 Populasi dan Sampel

Populasi diartikan sebagai keseluruhan Subjek Penelitian, sedangkan Sampel merupakan sebagian populasi atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2006: 130). Adapun metode pengambilan sampel yang digunakan peneliti adalah *Purposive Sampling* yaitu suatu metode pengambilan dimana pemilihan sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Umar, 2005: 92). Populasinya adalah seluruh pengurus DPD PAN Kota Pekanbaru yang berjumlah tujuh puluh enam orang dan yang dijadikan sampel enam puluh sembilan orang, karena identitas dari tujuh orang tidak diketahui.

1.7.4 Jenis Data

1.7.4.1 Data Primer : Data yang didapat dari sumber data pertama, baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti (Umar, 2005: 42). Untuk mendapatkan data tersebut yaitu dari Tim Formatur dan semua pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional kota pekanbaru.

1.7.4.2 Data Sekunder : Data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram (Umar, 2005: 4). Data tertulis yang sudah ada atau tersedia, atau informasi-informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam melandasi penelitian untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan yang diteliti. Data tersebut diperoleh langsung dari kantor sekretariat PAN Kota Pekanbaru.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

- 1.7.5.1 Kuesioner (Angket) : Teknik Pengumpulan data dengan memberikan atau menyebutkan daftar pertanyaan/ Pernyataan kepada responden dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan, daftar pertanyaan tersebut dapat bersifat terbuka atau tertutup (Umar, 2005 :49). Peneliti mengajukan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka dan tertutup kepada Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Pekanbaru.
- 1.7.5.1 Wawancara : Teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan (Moleong: 1999: 135). Tanya jawab langsung dengan Tim Formatur untuk mengetahui bagaimana pertimbangan dalam perekrutan anggota untuk menjadi Pengurus PAN kota pekanbaru periode 2010-2015.
- 1.7.5.2 Dokumentasi : dijelaskan Moleong (2000:161) merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, langger, agenda dan sebagainya. Dokumen sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk mengkaji, menafsirkan dan untuk meramalkan.

1.7.6 Teknik Analisa Data

Kegiatan Analisa ini dilakukan sejak peneliti memasuki lapangan dan memperoleh data yang memadai dilapangan. Menurut Moleong (1999:103) bahwa “analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan pada data-data.”

Data yang sudah diperoleh melalui teknik pengumpulan data, kemudian peneliti akan memilah-milah dan mengelompokkan data sesuai dengan jenisnya. Selanjutnya data dianalisa secara deskriptif analisis yaitu suatu analisa yang menggambarkan secara jelas berdasarkan kenyataan di lapangan tentang pelaksanaan fungsi partai politik khususnya rekrutmen politik pengurus di Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Pekanbaru.

Adapun Rumus yang digunakan adalah

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

P = Presentase

F = Frekuensi

N = Jumlah Sampel Penelitian (Arikunto, 2002: 112)

POLA REKRUTMEN POLITIK PADA PENGURUS DPD PAN KOTA PEKANBARU PERIODE 2010-2015

A. Identitas Responden (Umur, Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin)

Dalam penganalisaan mengenai pelaksanaan rekrutmen politik pada pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Pekanbaru Periode 2010-2015, perlu kiranya terlebih dahulu mengetahui identitas dari responden-responden yang tentunya dapat membantu pelaksanaan penelitian ini. Adapun identitas responden tersebut meliputi Umur, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin.

Identitas responden tersebut untuk melihat ataupun menganalisa terhadap pelaksanaan rekrutmen pengurus pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Pekanbaru Periode 2010-2015 yang mana identitas tersebut juga berfungsi sebagai status dari keberadaan pengurus tersebut didalam kepengurusan partai.

B. Pelaksanaan Musyawarah Daerah PAN Kota Pekanbaru

DPD Partai adalah pelaksanaan Eksekutif partai ditingkat Kabupaten/Kota dalam hal ini kepengurusan DPD PAN terpilih melalui Musyawarah Daerah Partai di kota Pekanbaru, Pengurus DPD PAN Kota Pekanbaru periode 2010-2015 merupakan pengurus yang terbentuk dari Musyawarah Daerah Partai pada tanggal 18 juni 2010 sampai dengan 17 juni 2015 yaitu menggantikan pengurus yang sebelumnya di bawah pimpinan Martius Gusti.

Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional Pada Pasal 23 ayat 1 menjelaskan bahwa Musyawarah Daerah (Musda) adalah Permusyawaratan di tingkat Daerah dalam partai yang diadakan atas undangan Dewan Pimpinan Daerah, dilaksanakan sekali dalam lima tahun yang dihadiri oleh peserta musyawarah daerah, peninjau musyawarah daerah dan undangan musyawarah daerah.

Dari penjelasan pasal tersebut dijelaskan mengenai mekanisme pelaksanaan rekrutmen, yang mana harus dihadiri :

1. Peserta Musyawarah Daerah
2. Peninjau Musyawarah Daerah
3. Undangan Musyawarah Daerah

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian pada bab sebelumnya, maka penulis mengumpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan temuan-temuan konkrit di lapangan. Proses Rekrutmen Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Pekanbaru dilihat dari indikator-indikator yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini,

Setelah dilakukan analisis tersebut maka kesimpulan terakhir dalam penelitian mengenai Pola Rekrutmen Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Kota Pekanbaru Periode 2010-2015 telah mengacu pada AD/RT hanya saja tidak terlalu diperhatikan oleh Perekrut atau Tim Formatur dalam merekrut calon anggota pengurusnya atau dapat dikatakan hanya sebagai formalitas saja, sebab walau calon pengurus tersebut tidak memenuhi persyaratan sesuai AD/RT tetapi tetap diterima sebagai pengurus. Pola Rekrutmen Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Kota Pekanbaru Periode 2010-2015 dapat dikatakan belum memenuhi harapan layaknya partai yang sudah dikenal oleh masyarakat atau juga dapat dikatakan kurang baik berdasarkan persentase temuan dilapangan. Tetapi bukan berarti pola rekrutmen pengurus dewan pimpinan daerah partai amanat nasional Kota Pekanbaru sepenuhnya tidak baik karena dalam kekurangan tersebut juga tidak bisa dilepaskan unsur-unsur baiknya, begitu juga sebaliknya dikatakan baik tetapi masih terdapat unsur tidak baik.

B. Saran

Penelitian yang dilakukan pada Pengurus Daerah sebuah partai yang berada disebuah kota yang mempunyai massa yang banyak ini, seharusnya Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional berbenah mengenai apa yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki karena apabila tidak segera diperbaiki maka akan menjadi cerminan terhadap pengurus dibawahnya atau pengurus setingkat yang berada di wilayah berbeda yang lebih terpencil. Dewan Kepengurusan yang seharusnya menjadi contoh akan tetapi belum menunjukkan kepantasannya sebagaimana layaknya organisasi kepartaian yang besar.

Partai besar hendaknya menunjukkan keprofesionalan dari partai itu dan terutama dalam perekrutan hendaknya berdasarkan kriteria dan syarat-syarat yang telah ditetapkan partai itu sehingga patut menjadi panutan bagi partai-partai kecil yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Al Chaidar, *PEMILU 1999: Pertarungan Ideologis Partai-partai Islam Versus Partai-partai Sekuler*, Jakarta: Pustaka Darul Falah, 1999.
- Al-Mubarakfuri, Shafiyurrahman, *Islam dan Partai Politik*, Jakarta: Pustaka At-tazkia, 2008.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian; suatu Pendekatan Praktek*, jakarta: Rineka cipta, 2006.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Cipto, Bambang, *Prospek dan Tantangan Partai Politik*, 1996.
- Fatwa, AM, *PAN Menyongsong Era Baru Keharusan Reorientasi*, Jakarta: Republika, 2004.
- Haryanto, *Sistem Politik Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty: 1982.
- Koentjoroningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1997.
- Mas'ood, Moechtar, dan Andrews Colin Mac. *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2008.
- Moleong, L.J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, 1999.
- Norris, Pippa, *Passage Legislative Recruitment In Advanced Democracies*. Cambridge University Press, Cambridge, 1997.
- Rush, Michael dan Philip Althof, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Siagian, Sondang P., *Filsafat administratif*, Jakarta: Gunung Agung, 1986.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES. 1989.
- Suharno, M.Si., *Diklat Kuliah Sosiologi Politik*. Universitas Negeri Yogyakarta, 2004.
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia widiasarana Indonesia, 1992.
- Suroto, dan Doddy Rudianto, *Partai-partai Politik di Indonesia*, Jakarta: Citra Mandala Pratama, 2003.
- Umar, Husein, *Metode Penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Dokumentasi

- “Anggaran Dasar (AD)/ Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Amanat Nasional” Keputusan Kongres III Partai Amanat Nasional Batam-Kepri, 8-10 januari 2010.

Skripsi

- Hardiansyah, Maitar, *Pola Rekrutmen Politik Partai Keadilan Sejahtera Di Indonesia*, Pekanbaru: Universitas Riau, 2008.

Website

<http://www.pan.com>

<http://www.adrt-pan.com>